

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TENTANG HAK RECALL
PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DPR**



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

RENISA FITRI

NPM. 1421020211

**Jurusan : Siyasa Syar'iyah
(Hukum Tata Negara)**

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS NEGERI ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG

1439H / 2018 M

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TENTANG HAK RECALL
PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DPR**

Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr.Hj. Zuhraini, SH., M.H.

Pembimbing II : Frenki, M.Si.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG

1439H / 2018 M

ABSTRAK

Partai politik memiliki hak untuk memberhentikan antar waktu atau sering dikenal dengan istilah recall anggota DPR. Pergantian antar waktu ini atau recall yang dilakukan partai politik kepada anggota DPR sering menjadi perdebatan karena kedudukan seorang anggota DPR sebagai wakil rakyat serta kedudukannya sebagai anggota partai politik. Pada awalnya Islam memang tidak mengenal sistem partai dalam mengurus dan mengatur negara, yang ada adalah sistem musyawarah, penunjukan, dan bai'at terhadap seseorang dalam kasus pemilihan kepala negara. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui representatif ummah yakni lembaga *Al-hall wa Al-'aqdi* yang menetapkan seseorang menjadi pemimpin ummat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dapat dirumuskan bagaimana hak recall partai politik terhadap Anggota DPR dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah tentang hak recall partai politik terhadap Anggota DPR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak recall partai politik terhadap Anggota DPR. Serta untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah tentang hak Recall partai politik terhadap anggota DPR. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dalam disiplin ilmu Fiqh Siyasah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menurut jenis penelitian termasuk dalam penelitian *library research*, berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir *deduktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hak recall partai politik bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan partai politik kepada anggota DPR. Karena Pemberhentian antar waktu atau recall dilakukan melalui perosedur yang panjang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak recall partai politik terhadap anggota DPR dilakukan sebagai upaya untuk mengontrol anggotanya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam fiqh siyasah tidak terdapat adanya pengaturan mengenai pemberhentian *Al-hall wa Al-'aqdi* atau anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik. Akan tetapi hal ini dapat menggunakan metode *ijtihad al-maslahah al-mursalah* yang digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan yang tidak diatur dalam syariat Islam atau dalil yang mendukung dan membatalkannya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Nama : Renisa Fitri
NPM : 1421020211
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H
NIP.196505271992032002

frenki, M.Si
NIP.198003152009011017

Ketua Jurusan Siyasah

Drs. Susiadi, M.Sos.I
NIP.197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG HAK
RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP DPR"**, disusun oleh Nama: **Renisa
Fitri NPM:1421020211**, Program Studi : **Siyasah (Hukum Tata Negara)**. Telah
diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
pada Hari/Tanggal: **Kamis, 5 juli 2018**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

Penguji I : Drs. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Frenki, M.Si

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002**

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا
وَإِنْ تَلَوُّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. an-Nisaa ayat 135).¹

¹ Al-Qur'an dan Terjemahan

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta yakni, Ibu Roaida dan Bapak Yusirman yang tak henti-hentinya selalu mendo'akan yang terbaik untuk penulis dan tak bosan-bosannya selalu memotivasi dan menasehati penulis setiap saat dan memberikan dukungan yang begitu besar kepada penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Adik-adik tersayang Faiza Anisa Ulfa, Fahrizal Rahman Dani, Ashifa Fathonah, Azkia Ahmad, Valian Dani Samad dan si bungsu Gibran Al-Qisthi yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
3. Teman-teman seperjuangan priode Siyasah '14, khususnya untuk kelas Siyasah C, dan umumnya untuk teman semua yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan dorongan dan semangat juang.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Renisa Fitri, dilahirkan pada tanggal 09 maret 1995, di pekon Gunung Kemala kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Merupakan anak pertama dari tujuh saudara, yang dilahirkan oleh seorang Ibu yang bernama Roaida dan Bapak yang bernama Yusirman.

Pendidikan penulis dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Krui dan selesai pada tahun 2007. Setelah itu dilanjutkan dengan bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Nahdatul Ulama (MTS NU) Krui selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pesisir Tengah selesai pada tahun 2013. Karna faktor ekonomi, penulis tidak langsung melanjutkan pendidikan selama satu tahun, dan selama itu juga penulis sempat bekerja untuk membantu kedua orang tua mencari biaya masuk perguruan tinggi. Atas izin Allah SWT, akhirnya pada tahun 2014 penulis diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dengan Program Studi Siyash.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Penulisan skripsi diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi, M.Sos.I., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Zuhraini, S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan dan banyak memotivasi

serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Frenki M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
7. Seluruh karyawan dan staf perpustakaan yang telah merawat buku serta memberikan pelayanan terbaik.
8. Sahabat tercinta, kawan seperjuangan sejak SMP Maryani yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Kawan seperjuangan tersayang Tutut Apridayanti, Juwita Permatasari, Asep Suprayogi, Yulida Leza, Fera Siska, Fitria Wulandari dan Harianto Arbi.
10. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Siyasah angkatan 2014 khususnya kelas C, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kebersamaan perjuangan selama ini.
11. Kawan-kawan KKN 178 dan 179 Udin, Cece, Hadi, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis disebutkan namanya satu persatu, terimakasih sudah memberikan kenangan terbaik selama KKN.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran yang membangun guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya dengan iringan

terimakasih penulis do'akan semoga jerih payah dan amal baik Bapak Ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung 9 maret 2018



Renisa Fitri
1421020211

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9

BAB II HAK RECALL PARTAI POLITIK DALAM PRESFEKTIF FIQH SIYASAH

A. Pengertian Partai Politik dalam Islam.....	12
B. Sejarah Partai Politik dalam Islam	16
C. Tujuan dan Fungsi Partai Politik dalam Islam	23
D. Hak Pemberhentian Partai Politik Terhadap Anggota Perwakilan menurut Fiqh Siyasah	26

BAB III HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DPR

A. Pengertian Partai Politik dan Hak Recall.....	36
B. Sejarah Recall Partai Politik terhadap Anggota DPR	43
C. Tujuan dan Fungsi Partai Politik.....	49
D. Hak dan Tugas Partai Politik	59
E. Hak Recall Partai Politik menurut Undang-Undang	61

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Hak Recall Partai Politik terhadap Anggota DPR 66
- B. Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik terhadap
Anggota DPR 69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 73
- B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas pokok bahasan dalam penulisan skripsi penulis memandang perlu menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini yang berjudul “**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DPR**” adapun beberapa istilah yang perlu diuraikan sebagai berikut:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.¹

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaifaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.²

¹ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer* (Jakarta: Modern English Press, 1999), h. 61.

² Ahmad Sukarja, Syarief Ibnu Mujaer, *Tiga Kategori Hukum(Syari'at, Fikih Dan Konun)*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 86.

Recall dipahami secara umum adalah penarikan kembali anggota DPR untuk diberhentikan dan karenanya digantikan oleh anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR yang ditarik tersebut.³

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁴

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul tersebut adalah sebuah upaya untuk mengetahui lebih dalam tentang hak Recall Partai Politik terhadap anggota DPR kemudian dianalisis menurut prespektif Fiqh Siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR” adalah sebagai berikut:

³M. Hadi Subhan, “Recall: Antara hak Partai Politik dan hak Berpolitik Anggota Parpol”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 4 (Desember 2006), h. 46

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pasal 1 ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pasal 68.

1. Secara objektif, bahwa recall yang merupakan penarikan kembali anggota DPR oleh partai politik untuk diberhentikan dan digantikan oleh anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatannya merupakan suatu hal yang menjadi perdebatan dikarenakan ia berada diantara kedudukan seorang sebagai wakil rakyat dan kedudukan seorang sebagai anggota partai politik.
2. Secara subjektif
 - a. Pokok bahasan ini sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni yaitu Siyasah.
 - b. Leteratur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan menunjang sabagai refrensi kajian dalam usaha menyelesaikan skripsi.
 - c. Pembahasan ini belum pernah dibahas sebelumnya di Fakultas Syariah dan hukum jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Kehadiran partai politik dalam sistem pemerintahan yang demokrasi tidak bisa dihindari. Kemerdekaan seorang untuk berserikat dan menyuarakan pendapatnya diidentikan dengan kehadiran partai politik dalam suatu pemerintahan yang demokrasi.⁶Partaipolitik secara umum dapat dikatakan bahwa suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh

⁶ Miftah toha, *Birokrasi Politik dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 79.

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan programnya.⁷

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik berfungsi sebagai sarana:⁸

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Penyerap penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menyalurkan kebijakan negara
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Jika fungsi partai politik tidak berkembang dengan baik maka sulit bagi demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan fungsi tersebut partai politik dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi tertentu.⁹ Dalam konteks di Indonesia, seorang calon anggota DPR yang direkrut suatu partai politik sebagai peserta pemilu untuk menjadi anggota DPR, setelah dipilih oleh rakyat pemilih dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai anggota DPR, memiliki hubungan hukum dengan partai politik yang mengusungnya dan juga dengan rakyat yang telah memilihnya.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Puaka Utama, 2014), h. 403-404

⁸ partai politik *Op.cit.*, , pasal 11

⁹ Jimly Asshidiqie, "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3. No. 4, (Desember 2006), h.9.

Partai politik selain memiliki fungsi juga memiliki hak yang tercatum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, partai politik berhak:¹⁰

- a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara
- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri
- c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik
- k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak partai politik dalam pemberhentian antar waktu anggota DPR atau sering dikenal dengan istilah Recall yang terdapat dalam huruf g dan huruf h. Selain itu Recall juga di atur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d, g, dan h Undang-

¹⁰*Ibid.*, Pasal 12

Undang No. 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi anggota partai politik lain.

Akan tetapi recall yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggota DPR banyak menjadi perdebatan di karenakan kedudukan seorang anggota DPR tersebut sebagai wakil rakyat serta kedudukannya sebagai anggota partai politik. Yang menjadi masalah adalah dimana hak recall partai politik ini cenderung didasarkan atas pertimbangan politisi semata.

Istilah partai dalam Islam disebut dengan perkataan *hizb*. Partai (*hizb*) secara *lughawi* mempunyai makna: Pertama, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas. Kedua, kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan. Ketiga, kader serta partisipannya. Mengikut pengertian istilah, partai atau *hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatukarena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama.¹¹ Perkataan *hizb* terdapat beberapa kalidalam Al-Quran, salah satunya:

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya: *Dan tatkala orang-orang mukmin melihat partai-partai musuh yang bersekutu itu, mereka berkata : "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya*

¹¹ Hasanudin Yusuf, "Partai Politik Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2014), h. 487-488.

kepada kita". dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. (QS. Al-Ahzab: 22)

Pada awalnya Islam memang tidak mengenal sistem partai dalam mengurus dan mengatur negara, yang ada adalah sistem musyawarah, penunjukan, dan bai'at terhadap seseorang dalam kasus pemilihan kepala negara. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui representatif ummah yakni lembaga *aahl al halli wa al-'aqdi* yang menetapkan seseorang menjadi pemimpin ummat.

Setelah wafatnya Utsman bin Affan terjadi perdebatan di kalangan kaum muslim salah satunya perselisihan mengenai imamah (kepemimpinan kaum muslim). Sebagai pengganti Utsman bin Affan sebagian umat Islam memilih Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin selanjutnya namun terjadi perlawanan yang dilakukan oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan di Damaskus. Muawiyah yang menjadi gubernur di Damaskus tidak mengakui ke Khalifahan Ali bin Abi Thalib.¹² Pada saat yang bersamaan umat Islam terpecah belah menjadi dua kubu. Pertama, kubu yang mendukung pembaiatan Ali bin Abi Thalib. Kedua, kubu yang mendukung Muawiyah sebagai khalifah setelah Utsman.

Dalam perkembangan selanjutnya, para pendukung Ali terpecah menjadi dua. Kelompok pertama disebut dengan Syiah, yaitu orang-orang yang tetap setia dan loyal dengan kekhalifahan Ali hingga wafatnya. Kelompok kedua disebut Khawarij, yaitu kelompok yang pada awalnya begitu amat sangat setia kepada Ali tetapi karena sebuah peristiwa bernama peristiwa At-Tahkim, akhirnya mereka keluar dari barisan pendukung Ali, bahkan menjadi pembangkang dan mengecam

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 121

Ali dan pendukungnya. Daris inilah awal mula munculnya partai politik islam yang kemudian melahirkan sekte-sekte politik pada periode selanjutnya, seperti Sunni, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah serta sekte-sekte lainnya.¹³

Persoalan hak recall partai politik sering menimbulkan perdebatan dikalangan politisi walaupun telah diatur melalui Undang-Undang, sedangkan dalam Islam pemberhentian anggota perwakilan oleh partai (*hizb*) merujuk pada nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian perlu adanya penelitian secara mendalam terhadap hak recall partai politik terhadap anggota DPR di analisis presfektif Fiqh Siyasah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi bahasan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana hak recall partai politik terhadap Anggota DPR?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah tentang hak recall partai politik terhadap Anggota DPR?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui hak recall partai politik terhadap Anggota DPR
- b. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah tentang hak Recall partai politik terhadap anggota DPR

¹³ Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 4.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan para pembaca khususnya mengenai pengaturan recall anggota DPR oleh partai politik, dan menambah wawasan dalam disiplin ilmu Fiqh Siyasah.
- b. Secara praktis. Untuk memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang ini serta untuk memenuhi salah satu syarat bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁴ Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research* yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (*kepustakaan*), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

¹⁴Mardalis, *Metode Penelitian Satu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yang merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur yang ada dan fenomena tertentu.¹⁵

2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum premier dalam skripsi ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan recall.
- b. Bahan hukum sekunder dalam skripsi ini berupa buku-buku yang membahas tentang Recall, perpolitikan, buku-buku tentang partai politik, serta buku-buku yang berhubungan DPR
- c. Bahan hukum tersier merupakan sumber data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dilakukan dengan penelitian pustaka dimana membaca buku-buku tentang partai politik, buku-buku Fiqh Siyasah, serta buku-buku yang berhubungan DPR, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan pokok bahasan.

¹⁵ Kaelan, MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

4. Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diperoses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pemeriksaan ulang, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik bersumber dari Al-qur'an dan hadist, atau buku-buku literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Sistematika data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁶

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir *deduktif*. Cara berfikir *deduktif* adalah metode analisis data dengan cara yang bermula dari data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁷

¹⁶ Amirudin, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pusaka, 2006), h. 107.

¹⁷ *Ibid.*, h. 89

BAB II

HAK RECALL PARTAI POLITIK DALAM PRESFEKTIF FIQH SIYSAH

A. Pengertian Partai Politik Dalam Islam

Islam merupakan sebuah keyakinan dan agama yang berkembang cukup pesat sejak abad ketujuh Masehi atas perjuangan Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga saat ini. Dengan berpegang kepada sumber ajaran utamanya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah, Islam menjadi sebuah kekuatan di dunia. Sedangkan disisi lain, politik adalah dimensi praktis dan menjarah yang terkait dengan kekuasaan dan kepartaian terutama dalam lingkupan negara. Dalam konteks ini Islam dan politik dipertemukan dalam suatu ruangan dimana pada kenyataannya Islam harus terlibat dalam aktifitas politik kemanusiaan untuk memperjuangkan kekuasaan dan kewilayahan. Karena kaum muslim sepakat bahwa Islam adalah agama komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan manusia.¹⁸

Pradigma politik yang dikembangkan sebagai landasan pendekatan seperti ini berakar pada diktum Islam sebagai agama dan sekaligus negara, yang berarti kesatuan antara agama dan politik menjadi suatu esensi yang tidak dapat ditawar lagi. Meskipun dalam pelaksanaannya kadar intensitas visi seperti ini bervariasi dari satu cendekiawan ke cendekiawan lain tetapi terdapat hal yang

¹⁸ Ridho Al-Hamdi, Op.Cit. h. 1.

mempertemukan mereka, yaitu adanya kehendak agar Islam menjadi alternatif dan dominan dalam politik.¹⁹

Merujuk pada pencerminan dari ajaran Islam mengenai politik (hubungan manusia dengan kekuasaan yang di illhami oleh petunjuk Allah) yang telah tercampur dengan berbagai kepentingan manusia. Islam politik adalah perjuangan Islam dibidang politik. Persepsi politik Islam ini bersifat ideologis, di mana pemikiran manusia dipengaruhi oleh garis panduan politik yang lebih bersifat “simbolik ideologis Islam”. Perjuangan Islam melalui struktur politik (partai politik Islam) dianggap sebagai satu-satunya kendaraan untuk mencapai tujuan politik. Oleh karena itu, mayoritas kelompok muslim dihabiskan demi partai politik, baik melanjutkan partai yang dulu ada maupun menghidupkan kembali yang telah dilarang dan atau menghadirkan yang baru.²⁰

Partai dan politik itu dasarnya adalah dua kata yang bersaing dan masing-masingnya memiliki makna tersendiri. Partai dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu organisasi sosial, dan politik merupakan upaya seorang atau segolongan orang untuk menguasai dan memperoleh kekuasaan. Ketika keduanya digabung dalam suatu kalimat menjadi partai politik maka maknanyapun menjadi lain. Partai politik adalah suatu organisasi masyarakat yang didirikan semata-mata untuk berjuang agar memperoleh kekuasaan dalam suatu negara.²¹

¹⁹ Muhammad A.S. Hikam, *Islam Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society* (Jakarta: Erlangga, 2000), h.198.

²⁰ Nasiwa, *Teori-Teori Politik* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 60.

²¹ Hasanudin Yusuf, *Op.Cit.* h . 487.

Istilah partai dalam Al-Qur'an disebut dengan perkataan *hizb*. Kalimat *hizb* berasal dari kata kerja tiga huruf (*al-fi'il ats-tsulatsi*), yakni *ha*, *dza*, *ba*. Dari sisi bahasa maknanya beragam, diantaranya *al-hizb* bermakna *al-wird* (dzikir). Terdapat pula *ahzab Al-qur'an* (bagian-bagian tertentu dalam Al-Qur'an). Demikian juga *al-hizb* bermakna *at-thaifa* (kelompok). Makanya jika dikatakan *tahadzdzabu* yakni *tajamma'u* yakni mereka berkumpul.²²

Partai (*hizb*) secara lughawi mempunyai makna: *Pertama*, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas. *Kedua*, kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan. *Ketiga*, kader serta partisipannya. Mengikut pengertian istilah, partai atau *hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama.²³ Partai menurut Imam ar-Razi dalam Mafatih al-Ghaib adalah kumpulan orang yang satu tujuan, mereka bersama-sama bersatu dalam kewajiban untuk mewujudkan tujuannya. Sementara itu dalam kamus *Al-muhit*, disebutkan, “sesungguhnya partai politik adalah sekelompok orang, partai adalah seorang dengan pengikut dan pendukungnya yang mempunyai satu pandangan dan satu nilai.”²⁴

Partai politik (*al-hizb as-siyasi*) menurut pemahaman ilmu politik kontemporer, berarti sebuah organisasi yang terdiri dari kelompok orang yang mempunyai nilai-nilai dan tujuan yang sama, yaitu merebut atau mempertahankan kekuasaan politik.²⁵

²² Ramoung Samudin, *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Politik*, (Jakarta: Gozan Press, 2013), h. 214.

²³ Hasanudin Yusuf, *Op.Cit.*, h.

²⁴ Ayi Sofyan, *Etika politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h 34.

²⁵ Ramoung Samudin, *Op.Cit.* h. 214.

Perkataan *al-hizb* banyak disinggung dalam ayat-ayat Al-qur'an juga dalam As-sunnah. Adapun kata *al-hizb* yang terdapat dalam Al-qur'an dapat dijumpai dalam ayat, sebagai berikut:²⁶

Firman Allah ta'ala dalam Al-qur'an surah Al-maidah ayat 56:²⁷

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya hizb (penolong agama) Allah itulah yang pasti menang”.

Kata *hizb* disini maknanya penolong (Agama Allah). Orang-orang beriman adalah *hizbullah* (penolong Agama Allah). *Al-hizb* adalah dari segolongan umat manusia. Kata *hizb* adalah *thaifah* (kelompok), jika dikatakan *tahadzdzabu* artinya *tajmama'u* (mereka berkumpul). *Al-azhab* artinya kelompok yang berkumpul untuk memerangi para Nabi. Jika dikatakan *hazabahu al-amr* artinya ia ditimpa sebuah persoalan.²⁸

Firman Allah ta'ala dalam Al-qur'an surah Al-Ahzab ayat 22:

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat partai-partai musuh yang bersekutu itu, mereka berkata : "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan.

²⁸ Ramoung Samudin, *Op.Cit.* h. 217.

kepada kita". dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.²⁹

Firman Allah ta'ala dalam Al-qur'an surah Faathir ayat 6:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, Maka anggaplah ia musuh(mu), karena Sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya (hizb) supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.”³⁰

Istilah partai dalam percaturan hari ini sudah sangat membaur dengan kehidupan manusia, baik muslim atau bukan. Kecuali negara-negara yang menganut sistem monarkhi penuh saja yang tidak menganut sistem partai untuk menentukan kepala negara dan parlemen seperti Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Brunei Darussalam dan sebagainya. Sementara hampir semua negara lain di dunia hari ini menganut sistem partai sebagai atribut politik negaranya.³¹

B. Sejarah Partai Politik dalam Islam

Khasanah pemikiran politik Islam dimulai dari sosok Nabi Muhammad yang tidak hanya pemimpin spiritual melainkan juga pemimpin politik

²⁹ Alqur'an dan terjemah.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Hasanudin Yusuf, Op.Cit. h 489.

pemerintahan.³² Berbeda dengan pandangan Ali Abd ar-Riziq yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu hanya seorang yang membawa risalah dan menyampaikan ajaran tersebut kepada ummatnya, begitu juga dengan Islam sebagai agama dan tidak membicarakan masalah politik dan kenegaraan.³³ Mengkaji Islam dan politik berarti mengulas tentang dua hal berbeda. Di satu sisi, Islam merupakan sebuah keyakinan dan agama yang berkembang cukup pesat sejak abad ketujuh Masehi atas perjuangan Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga saat ini. Dengan berpegang kepada sumber ajaran utamanya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah, Islam menjadi sebuah kekuatan besar di dunia. Sedangkan di sisi lain, politik adalah dimensi praktis dan menjarah dan terkait dengan kekuasaan dan kepartaian terutama dalam lingkup negara. Dalam konteks ini, Islam dan politik dipertemukan dalam suatu ruang dimana dalam kenyataannya Islam harus terlibat dalam aktivitas politik kemanusiaan untuk memperjuangkan kekuasaan dan keiwilayahan. Karena kaum Muslim sepakat Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan manusia.³⁴

Secara tegas sejarah politik Islam tidak memberikan contoh tentang partai politik. Partai politik baru dikenal pada masa modern ini. Apa yang bisa dicari adalah benih-benih partai politik yang telah dilakukan pada masa lampau khususnya Islam awal. Peristiwa *Tsaqifah Bani Saidah* misalnya yang dikenal sebagai cikal bakal politik Islam, bisa menjadi model munculnya partai politik

³² Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran politik Husein Haikal* (Jakarta:Paramadina, 2000), h. 193.

³³ Ali 'Abd ar-Riziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm Bahs fi al-Alaqah wa al-hukumah fi al-Islam* (Mesir: Sahimah Mishriyyah, 1334 H/1925 M). cetakan ke 3. h. 64-65.

³⁴ Ridho AL-Hamdi, *Op.Cit.*, h. 1.

dalam sejarah politik Islam. Kelompok *Ansar* yang merupakan penduduk asli Madinah secara bersama-sama bertanggungjawab atas keberlangsungan negara Madinah yang telah didirikan oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kelompok ini semula memandang bahwa secara politis negara Madinah harus diteruskan dengan cara mencari pengganti Nabi sebagai khalifah di Madinah. Nabi tidak pernah memberi petunjuk atas apa yang harus dilakukan apabila kelak nanti sahabat ditinggalkan Nabinya³⁵ Dalam pertemuan itu, suku khazraj menunjuk Sa'ad ibn 'Ubaidah sebagai khalifah, namun suku Aws belum menerima pencalonan Sa'ad tersebut, karna mereka juga mempertimbangkan kemungkinan golongan muhajirin menentukan calonnya sendiri. Menghadapi keberatan suku Aws sebagian kaum *Khazraj* bersikukuh pada pendirian mereka, meskipun kaum *Muhajirin* juga akan mempertimbangkan pemimpin dari kalangan mereka. Sekelompok kaum Aws ketika itu berkata, "kalau demikian (kemungkinannya), kita akan katakan pada mereka (*Muhajirin*) bahwa dari kita seorang amir dan dari mereka pun seorang amir. Selain itu, kita tidak akan setuju." Menanggapi pendapat demikian, Sa'ad ibn 'Ubaidah menyatakan bahwa ini adalah awal kelemahan yang akan membawa perpecahan umat Islam sendiri.³⁶

Mendengar berita bahwa kelompok Anshar melangsungkan pertemuan di *Saqifah* balai pertemuan Bani Saidah, Umar mengajak Abu Bakar untuk segera pergi kebalai pertemuan tersebut. Ditengah jalan, mereka bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarah, seorang sahabat senior yang juga dari kelompok Muhajirin,

³⁵ "Format Partai Politik Dalam Sejarah Politik Islam" (On-line), tersedia di: <http://febi.walisongo.ac.id/category/kolom/kolom-dekan.htm> (9 maret 2015).

³⁶ Muhammaad Iqbal, *Fiqh Siyasaah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: Prena Media, 2016), h. 50.

dan mereka mengajaknya ikut serta. Ketika tiga tokoh tersebut sampai di balai pertemuan, sudah datang pula sejumlah orang Muhajirin bahkan telah terjadi perdebatan sengit antara kelompok Anshar dan kelompok Muhajirin. Masing-masing pihak mengemukakan alasan mereka memegang jabatan Khalifah. Pihak Anshar menganggap mereka lebih berhak, karena mereka menampung Nabi dan kaum Muhajirin di saat orang-orang kafir Mekkah memusuhi dakwah Nabi Saw dan umat Islam. Sementara kelompok Muhajirin juga merasa berhak karena merekalah yang berjuang bersama Nabi Saw dan mengalami pahit getir menegangkan agama Islam sejak di Mekkah. Abu Bakar dengan nada tenang mulai berbicara baliu mengngatkan kepada kelompok Anshar bahwa Nabi pernah bersabda bahwa kepemimpinan umat Islam seyogianya berada pada tangan suku Quraisy, dan bahwa hanya dibawah pimpinan suku itulah akan terjamin keutuhan, keselamatan, dan kesejahteraan bangsa Arab. Dia juga mengingatkan orang-orang Anshar tentang masalah mereka sebelum masuk Islam tentang suku Kharaj dan suku Aus selalu bermusuhan, dan seandainya yang menjadi khalifah seorang Anshar salah satu dari dua suku utama itu, besar kemungkinan suku lain tidak menerimanya, sehingga muncul kembali permusuhan pada zaman jahiliyah. Kemudian, Abu Bakar menawarkan dua tokoh Quraisy untuk dipilih sebagai khalifah, yaitu Umar bin Khatab atau Abu Ubaidah bin Jarah. Orang-orang Anshar tampaknya sangat terkesan dengan ucapan Abu Bakar.³⁷

Umar tidak menyia-nyiakan momentum yang sangat baik itu. Dia bangun dari tempat duduknya menuju ke tempat Abu Bakar untuk berbaiat menyatakan

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyash , Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 214.

kesetiaannya kepada Abu Bakar sebagai khalifah, seraya menyatakan bahwa bukankah Abu Bakar yang selalu diminta oleh Nabi untuk menggantikan beliau sebagai imam shalat bilamana Nabi sakit, dan Abu Bakar adalah sahabat yang palingdisayangi oleh Nabi. Perbuatan Umar itu diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarah. Akan tetapi, sebelum dua tokoh Quraisy itu tiba di depan Abu Bakar untuk mengucapkan baiat, Basyir bin Saad, seorang tokoh Anshar dari suku Khazraj, mendahului mengucapkan baiatnya kepada Abu Bakar. Barulah kemudian Umar dan Abu Ubaidah serta para hadirin, baik dari kelompok Muhajirin maupun kelompok Anshar, termasuk Asid bi Khudair, seorang tokoh Anshar dari suku Aus. Pada hari berikutnya, Abu Bakar naik mimbar di Masjid Nabawi dan berlangsung baiat umum.³⁸

Selain peristiwa *Tsaqifah Bani Saidah* sejarah partai politik juga dapat ditelusuri sejak masa kepemimpinan Khalifah Ustman bin Affan yang berseteru dengan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa “Ali kontra Ustman” yang menimbulkan perdebatan dikalangan kaum muslim. Yang menjadi perselisihan adalah mengenai *Imamah* (kepemimpinan kaum muslim) dan syarat-syaratnya serta siapa yang berhak memegangnya. Kelompok Ali meyakini bahwa *Imamah* yang tepat adalah Ali dan keturunan-keturunannya. Sedangkann lawan politikny mengatakan, bahwa yang berhak memegang jabatan *Imamah* haruslah orang terbaik dan paling cakap meskipun dia budak dan bukan keturuna Quraisy.³⁹

³⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: UI Press, 1990), h. 22-23.

³⁹ Ridho AL-Hamdi, *Op.Cit.*, h. 4.

Pasca-pembunuhan Ustman suasana memang begitu kacau. Umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. Tidak semua umat Islam melakukan baiat kepada Ali. Di Syam, Muawiyah yang masih keluarga Ustman menuntut balas kepada Ali atas kematian Ustman. Ia menuduh Ali berada di kaum pemberontak. Perlawanan Muawiyah ini bahkan dinyatakan secara terbuka dengan mengangkat dirinya sebagai Khalifah di Syam. Ia bahkan mengarahkan tentaranya untuk memerangi Ali.⁴⁰ Pertempuran sengit pun tidak dapat dihindarkan. Setelah pada masing-masing pihak banyak yang terbunuh, akhirnya dicapai kesepakatan gencatan senjata dengan tahkim. Tetapi tahkim ini ternyata hanya siyaset Muawiyah saja. Hasilnya malah merugikan pihak Ali. Tahkim tersebut menjadi alat legitimasi untuk menurunkan Ali dari jabatan khalifah dan digantikan oleh Muawiyah. Karena itu, dibarisan Ali sendiri banyak pula yang kurang puas atas tahkim ini.⁴¹

Dalam perkembangan selanjutnya, para pendukung Ali, mengalami konflik internal dan terbelah menjadi dua. Kelompok pertama disebut dengan Syiah, yaitu orang-orang yang tetap setia dan loyal dengan kekhalifahan Ali hingga wafatnya. Kesetiaan kelompok ini hingga anak cucu keturunan berikutnya. Kelompok kedua disebut dengan kaum Khawarij, yaitu kelompok yang pada awalnya begitu amat sangat setia terhadap Ali tetapi karena sebuah peristiwa bernama peristiwa At-Tahkim, akhirnya mereka keluar dari barisan pendukung Ali, bahkan menjadi pembangkang dan mengancam Ali dan pendukungnya.⁴²

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h. 85.

⁴¹ *Ibid.*, h. 121.

⁴² Ridho AL-Hamdi, *Op.Cit.*, h. 5.

Dari perkembangan politik pada awal sejarah Islam ini dapat disimpulkan empat aliran yang timbul, yaitu Sunni, Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah.⁴³

Terdapat perbedaan pemikiran politik dari aliran Sunni, Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah salah satunya mengenai pemilihan pemimpin dalam Islam.

1. Menurut aliran Sunni untuk mengendalikan pemerintahan secara efisien dan membela iman, khalifah harus memenuhi tujuh kriteria sebagai yaitu adil, berpangkat luas, sehat mental dan fisik, berani, cepat mengambil keputusan dan dari suku Quraisy.
2. Menurut aliran Syi'ah yang berhak memimpin umat Islam hanyalah imam. Yang berhak menggantikan Nabi sebagai pemimpin hanyalah Ali bin Abi Thalib. Hak Ali atas kepemimpinannya itu bukan dilihat dari sudut kecakapan, sifat, atau lainnya, tapi yang terpenting adalah bahwa hal itu sudah diwasiatkan oleh Nabi.⁴⁴
3. Pemikiran politik Khawarij berbeda dengan pemikiran Sunni dan Syiah, mereka tidak mengakui hak-hak istimewa orang atau kelompok tertentu untuk menduduki jabatan khalifah. Menurut mereka, siapa saja berhak menduduki jabatan khalifah, kalau memang mampu. Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam.⁴⁵
4. Pemikiran politik Mutazilah tidak jauh berbeda dengan Khawarij dalam persyaratan menjadi imam, yaitu berilmu, adil dan berani, namun dalam hal keturunan, mereka cenderung berlebihan, mereka memang membolehkan imam dari selain suku Quraisy, bahkan cenderung

⁴³ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h. 122.

⁴⁴ Yusran Asmuni, *Ilmu Tauhid* (Jakarta: Grafindo Persada, 1993), h. 138

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h.140

mengutamakan imam yang bukan dari Quraisy, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-syahrastani, bahwa seandainya ada calon dari kaum Habasyi dan Quraisy yang pada kenyataannya mereka berdua sama-sama mengamalkan Al-quran dan hadits, maka lebih baik mendahulukan habasyi ketimbang Quraisy, sebab Habasyi gampang diberhentikan dari keimamahan apabila terjadi penyimpangan dari dasar yang ada.⁴⁶

Dari penjelasan tentang pemikiran aliran-aliran di atas, kita dapat mengaitkan aliran tersebut dengan partai politik pada saat ini, dimana tiap-tiap partai memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda.

C. Tujuan dan Fungsi Partai Politik dalam Islam

Sebagai representasi dari perjuangan Islam, partai politik Islam harus memiliki tujuan sebagai spirit gerakannya. Tentunya, tujuan dari partai Islam tidak terlepas dari keberadaan sebuah institusi negara sebagai media bagi partai Islam untuk mewujudkan cita-cita besar Islam. Adapun tujuan partai Islam dapat dirumuskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi: *Baldatun thayyibatun warabbun ghofur* yang artinya terwujudnya sebuah negara yang terdiri atas masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang diridhai oleh Allah SWT dari tujuan ini dapat dirumuskan tujuan utama partai Islam.⁴⁷

1. Masyarakat yang adil. Keadaan dimana seluruh masyarakat disuatu negara tidak ada yang merasa terintimidasi maupun terpinggirkan dari

⁴⁶ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), h. 240.

⁴⁷ Ridho AL-Hamdi, *Op.Cit.*, h. 9.

kehidupan masyarakat luas serta mendapatkan hak-haknya sebagai salah seorang warga yang mendiami suatu daerah tertentu.

2. Masyarakat yang makmur dan sejahtera. Setiap manusia menginginkan hidup bahagia. Salah satu indikator hidup bahagia adalah memperoleh kemakmuran dan sejarah hidup makmur, mengindikasikan kehidupan seseorang yang sudah cukup dari segi materi dan sejahtera mengindikasikan bahagianya seseorang tidak hanya dari segi materi juga sedari segi psikis.
3. Masyarakat aman dan nyaman. Salah satu fungsi negara adalah membuat warganya merasa aman dari berbagai bentuk kejahatan maupun tindak kriminal lainnya. Sedangkan nyaman adalah rasa bahagia dari segi psikologis seseorang yang hidup dalam lingkungan tertentu. Tujuan ini merupakan tujuan dari partai Islam untuk menjadikan masyarakat tidak merasa terganggu dari segala bentuk kejahatan maupun gangguan masyarakat sekitar.⁴⁸

Menurut Yuszil Ihzal Mahendra, tujuan partai politik Islam adalah menegakkan kedaulatan tuhan dimuka bumi ini dan menjadikan Islam sebagai sistem jalan hidup di atas dunia.⁴⁹

Menurut Abul'ala al-Maududi partai politik Islam mempunyai tujuan yaitu “untuk menegakkan kedaulatan tuhan dimuka bumi” dan “menjadikan Islam sebagai jalan hidup dunia ini”. Tokoh-tokoh Islam akan dikhususkan pada orang

⁴⁸ *Ibid.*, h. 10.

⁴⁹ Yuszil Ihzal Mahendra, *Moderenisme Dan Fundamentalisme dalam Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 97.

yang sungguh-sungguh beriman dan bertakwa. Yaitu orang-orang yang ikhlas berjuang untuk menegakkan kalimah Allah dan mencari keridhaan-Nya.⁵⁰

Fungsi partai politik dalam Islam yaitu:

1. Partai politik harus mampu mengoreksi pemimpin. Keberadaan partai politik memiliki tugas dan kewajiban sesuai yang ditentukan oleh Allah SWT yaitu mendakwahkan ajaran Islam dan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-imran ayat 104, sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

Ayat diatas, menegaskan bahwa ditangan penguasalah puncak kema'rufan dan kemungkaran, karena itu fungsi utama *amar ma'ruf nahi munkar* bersentuhan langsung dengan penguasa. Partai politik berperan untuk mengoreksi pemimpin jika dalam masa jabatannya melakukan penyimpangan, maka tugas dan kewajiban partai Islam untuk meluruskan sesuai dengan ajaran Islam.

2. Fungsi partai Islam yaitu membina kesadaran politik masyarakat. Yang disebut kesadaran politik Islam yaitu umat harus mengamati dan memahami situasi politik dari sudut pandang Islam.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 90.

3. Partai politik Islam berfungsi sebagai upaya mewujudkan dan menjaga tegaknya ajaran Islam. Tugas dan kewajiban partai Islam adalah merealisasikan ide-ide Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Maka partai Islam harus dibangun diatas ideologi, partai Islam harus mengusung ideologi Islam. Partai Islam harus bersifat universal yang tidak berasaskan kesukuan, kelompok dan kebangsaan.⁵¹

D. Hak Pemberhentian Partai Politik Terhadap Anggota Perwakilan Menurut Fiqh Siyasah

Istilah lembaga perwakilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan *Al-hall Wa Al-'aqdi* yang secara harfiah berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan *Al-hall Wa Al-'aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat (warga negara).⁵² *Al-hall Wa Al-'aqdi* adalah orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujuan pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa, dan adil dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.⁵³

Rasyid Ridla berkaitan dengan perwakilan ini berkata,” Demikianlah, di kalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakata, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-masalah

⁵¹ Partai Politik Islam” (On-Line), tersedia di: <http://www.bimbingan.org/peranan-parpol-Islam.com> (10 febuari 2014)

⁵² Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h.159.

⁵³ Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 66.

kemasyarakatan dan politik. Itulah yang disebut dengan *ahlu syura* atau *Al-hall Wa Al-'aqdi* di dalam Islam. Pengangkatan khalifah tidaklah dibenarkan, kecuali apabila mereka itulah yang memilihnya serta mem*bai'at*-nya dengan kerelaannya. Mereka itulah yang disebut dengan wakil masyarakat pada bangsa-bangsa lainnya.⁵⁴

Menurut Al-Mawardi, *Al-hall Wa Al-'aqdi* harus melalui dua proses, yakni melalui proses pemilihan oleh *Al-hall Wa Al-'aqdi* dan melalui proses penyerahan mandat oleh pemimpin sebelumnya. *Al-hall Wa Al-'aqdi* (Ahlul Ikhtiyar) yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk diba*iat* (dinobatkan) oleh mereka.⁵⁵ Ada beberapa pengertian *Al-hall Wa Al-'aqdi* diantaranya sebagai berikut:

1. Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut pula dengan istilah *Ahlu al-Ikhyar*.
2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai kode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.

⁵⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2009), h.76.

⁵⁵ Faturrahman A. Hamid, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Hamzah, 2009), h. 108.

4. *Al-hall Wa Al-'aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.⁵⁶

Al-hall Wa Al-'aqdi mempunyai kedudukan yang penting dalam pemerintahan Islam. Antara khalifah dan *Al-hall Wa Al-'aqdi* bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat. Kedudukan *Al-hall Wa Al-'aqdi* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih Khalifah dan mengawal Khalifah menuju kemaslahatan umat. Jadi kedudukan *Al-hall Wa Al-'aqdi* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa intervensi dari Khalifah.⁵⁷

Mengingat pentingnya kedudukan *Al-hall Wa Al-'aqdi*, maka Al-Mawardi menentukan syarat-syarat sebagai anggota *Al-hall Wa Al-'aqdi*. Yakni harus memenuhi tiga syarat berikut ini:⁵⁸

1. Memiliki sifat 'adil yang mencakup semua syarat-syaratnya.
2. Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat muktabar pada diri Imam tersebut.
3. Memiliki pendapat ra'yu dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi imam serta paling kuat dan pandai mengurus kemaslahatan.

⁵⁶ Jubair situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: pustaka Setia, 2012), h. 255-256.

⁵⁷ Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*, h.67.

⁵⁸ Abdul Hayyie al-Kattani, Komaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 39.

Dengan persyaratan ini diharapkan *Al-hall Wa Al-'aqdi* dapat menentukan siapa diantara calon Khalifah yang benar-benar pantas menjadi Khalifah dan mampu memegang amanah itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.⁵⁹ Sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Mawardi “apabila *Al-hall Wa Al-'aqdi* berkumpul untuk memilih, mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria, lalu mereka mengajukan orang terbaik dan paling sempurna kriterianya untuk disumpah. Mengajak rakyat untuk taat kepadanya dan tidak menahan diri dari pembaiatnya.”⁶⁰

Abu A'la al Maududi disamping menyebutnya dengan *Al-hall Wa Al-'aqdi*, *ahl syura*, juga menyebutnya dengan dewan penasehat. Dari uraian para ulama tentang *Al-hall Wa Al-'aqdi* ini tampak hal-hal sebagai berikut:⁶¹

1. *Al-hall Wa Al-'aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiat *imam*.
2. *Al-hall Wa Al-'aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
3. *Al-hall Wa Al-'aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis.
4. *Al-hall Wa Al-'aqdi* tempat konsultasi *imam* di dalam menentukan kebijakannya.
5. *Al-hall Wa Al-'aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan.

⁵⁹ Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*, h.70.

⁶⁰ Abdul Hayyie al-Kattani, *Op.Cit.*, h. 39.

⁶¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 117-118.

Wewenang nomor 1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang nomor 3 dan 5 adalah wewenang DPR, dan wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik Barat terhadap Dunia Islam, pemikiran tentang *Al-hall Wa Al-'aqdi* juga berkembang. Para ulama ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat atau DPR/MPR sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *Al-hall Wa Al-'aqdi* dengan mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di barat. Dalam prakteknya, mekanisme pemilihan anggota *Al-hall Wa Al-'aqdi* atau DPR ini menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara:

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *Al-hall Wa Al-'aqdi* sesuai dengan pilihannya.
2. Pemilihan anggota *Al-hall Wa Al-'aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *Al-hall Wa Al-'aqdi*.
3. Di samping itu, ada juga anggota *Al-hall Wa Al-'aqdi* yang diangkat oleh kepala negara.⁶²

⁶² Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h. 165.

Menurut Al-Mawardi *l-hall Wa Al-'aqdi* terbatas pada dua hal, yaitu:

- a. Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
- b. Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Selain dua hal diatas, lembaga *Al-hall Wa Al-'aqdi* juga memiliki wewenang untuk memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan itu juga dilakukan secara musyawarah.⁶³ Secara eksplisit dalil tentang *Al-hall Wa Al-'aqdi* tidak terdapat dalam dua sumber Al-Qur'an dan Hadis, namun sebutan tersebut hanya ada dalam fiqh di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial, maka dasar *Al-hall Wa Al-'aqdi* di qiaskan dengan istilah Uli al Amri.⁶⁴

Pemberhentian lembaga perwakilan atau *Al-hall Wa Al-'aqdi* tidak terdapat dalam fiqh siyasah oleh karna itu hak pemberhentian partai politik terhadap anggota perwakilan dapat di kaitkan dengan metode ijihad Al-Maslahah Mursalah. *Al-maslahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang sesuai dengan syariat Islam atau kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah dalam bentuk hukum, dan ia tidak ditopang denga dalil yang mendukung atau yang membatalkannya.⁶⁵ Pada umumnya, *al-maslahah al-mursalah* digunakan dalam

⁶³ Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group), h.184-185.

⁶⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* terjemahan Faturrahman A. Hamid h, (Jakarta: Amzah, 1998), h, 82.

⁶⁵ Ridwan HR, *Fiqh Politik, gagasan, harapan dan kenyataan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 283.

mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Qur'an dan Hadis.⁶⁶ Tujuan utama *al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara (menjauhkan) dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya. Secara teoritis, prinsip kemaslahatan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Rachmat Syafe'i yaitu:⁶⁷

1. Melihat kemaslahatan yang terdapat dalam kasus yang mempersoalkannya.
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syariat yang mengharuskan adanya ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syariat Islam.

Sehubungan dengan itu, para ulama mensyaratkan penggunaan *al-maslahah al-mursalah*. Sebagai contoh, Muhammad Abu Zahrah menetapkan syarat, yaitu:⁶⁸

1. Keharusan adanya persesuaian antara “kemaslahatan” dengan *maqasid al-syariah*. Artinya, pemahaman dan pelaksanaan “kemaslahatan” (yang ditetapkan suatu masyarakat, dan terutama penguasanya) tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam dan apalagi

⁶⁶ A. Djazuli, *Op.Cit.*, h. 51

⁶⁷ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h. 27.

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Farabi, 1377H/ 1958M). h.

bertolak belakang dengan dalil yang qath'i. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki syara'.

2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat *ma'qul*. Artinya, masyarakat, terutama para pemegang otoritas di bidang keilmuan, akan menerimanya sebagai suatu yang masuk akal (rasional).
3. Pelaksanaan kemaslahatan tersebut tidak boleh menimbulkan kesulitan, tapi mendatangkan kemudahan.

Abd al-Wahab al-Khalaf mensyaratkan penggunaan *al-maslahah al-mursalah* yang meliputi:⁶⁹

- a. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan yang meyakinkan, bukan kemaslahatan yang meragukan. Oleh karena itu, harus berdasarkan kepada hasil penelitian yang mendalam.
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, bukan bersifat khusus. Artinya, lebih banyak memaslahatkan masyarakat secara keseluruhan daripada sekelompok orang atau seseorang tertentu.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat, baik yang ditetapkan nash atau ijma'.

Hanafi mengatakan bahwa syarat-syarat kemaslahatan adalah:

1. Tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalil yang sudah dikenal.
2. Maslahat karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.

⁶⁹ Abd al-Wahab Al-Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*. (Mesir: Ad-Dar al-Kuwaitiyah, 1388H/1968M). h. 86-87.

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan sistem pengaturan dan pengurusan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkannya pada kemudharatan.⁷⁰

Pembentukan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan tidak terdapat ketentuannya secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Pembentukan lembaga-lembaga didasarkan ada tuntutan keadaan dan tempat. Dengan kata lain pembentukan lembaga merupakan persoalan ijtihad, bukan sesuatu yang ditentukan oleh nash. Hal ini berarti umat Islam diberikan keleluasaan dan kelonggaran untuk menciptakan berbagai kelembagaan yang diperlukan untuk efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan.⁷¹

Islam mewajibkan penguasa untuk selalu bermusyawarah dengan rakyat dan para pengikutnya. Cara permusyawaratan itu tidak diperinci, apakah dengan memakai sistem permusyawaratan langsung atau memakai sistem perwakilan. Tetapi Islam sangat menekankan agar jiwa permusyawaratan itu merupakan jiwa yang dominan dalam kehidupan politik dalam masyarakat. Praktik permusyawaratan itu, selain bersumber dalam ayat-ayat Al-Qur'an sendiri, juga merupakan gaya hidup Nabi Muhammad Saw sendiri, sehingga dalam sebuah hadis dikatakan bahwa beliau adalah seorang yang paling banyak melakukan permusyawaratan dalam hidupnya. Mekanisme yang erat hubungannya dengan

⁷⁰Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h. 28.

⁷¹ Ridwan HR, h. 281.

pelaksanaan kekuasaan adalah kewajiban orang Islam untuk menyuruh melakukan kebaikan dan melarang yang tidak baik (*amar ma'ruf nahi munkar*).⁷²



⁷² Hertanto, *Teori Teori Politik dan Pemikiran Politik di Indonesia* (Lampung: Universitas Lampung, 2006), h. 223-224.

BAB III

HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DPR

A. Pengertian Partai Politik dan Hak Recall

Partai sebagai suatu kekuasaan politik adalah suatu gejala baru bagi semua negara di dunia ini, dalam arti bahwa umurnya tidak setua umur masyarakat manusia. Istilah partai politik sendiri baru muncul pada abad sembilan belas dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga perwakilan dan meningkatnya frekuensi pemilihan umum dan meluasnya hak mereka yang bisa mengambil bagian dalam pemilihan umum.¹

Partai politik lahir untuk pertama kali di Eropa Barat. Partai politik pada umumnya merupakan manifestasi daripada sistem politik yang sudah modern. Dengan timbulnya dan berkembangnya suatu gagasan bahwa rakyat merupakan suatu faktor yang harus diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses kegiatan politik, maka lahirlah partai politik dan berkembang sampai sekarang.²

Di Indonesia, kemunculan partai-partai politik tak lepas dari terciptanya iklim kebebasan yang luas bagi masyarakat pasca-runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda. Kebebasan tersebut memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk partai politik.³

Kata “partai” berasal dari kata “part” berarti bagian atau pihak, porsi, yang merupakan bagian dari warga negara dari suatu negara. Jadi partai merupakan

¹ Farchan Bulkin, *Analisa Kekuasaan Politik di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka LP3S Indonesia, 1995), h. 189.

² Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 111.

³ Muhadam Labolo, Yeguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, teori, konsep, dan isu strategis* (Jakarta: Rajawali Pers. 2015), h. 2.

perkumpulan sejumlah warga negara yang tergabung dalam suatu kesatuan dengan tujuan tertentu.⁴

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para sarjana. Terdapat beberapa contoh definisi yang dibuat oleh ahli ilmu klasik dan kontemporer.

Roger F.Soltau mengatakan bahwa partai politik itu adalah “sekelompok warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melakukan kebijakan mereka sendiri.

Carl J.Friedrich juga mengatakan bahwa “partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya

⁴R. Erman Muchdin, *Tata Negara Indonesia* (Jakarta : Yudistira, 1986), h. 55.

⁵Partai Politik, *Op.Cit.*, pasal 1 ayat (1).

dan dengan berdasarkan penguasaan tersebut, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta material.⁶

Sigmund Neumann dalam buku karyanya, *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi ssebagai berikut:

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. (*A political party is the articulate organization of society's active political agents: those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other group or groups holding devergent views*).

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Ahli lain yang juga turut merintis studi tentang kepartaian dan membuat devinisinya adalah Giovanni Sartori, yang karyanya juga menjadi klasik serta acuan penting. Menurut Sartori:

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. (*A party is any political*

⁶ P.Antoniuss Sitepu, *Studi Ilmu Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 118.

*group that present at elections, and is capable of placing though elections candidates for public office).*⁷

Partai politik menurut Mac Iver dalam bukunya *“The Modern State”* mendefinisikan partai politik sebagai: *“An association organized in support of some principle or policy which by institutional means it endeavours to make determinat of government”* (suatu perkumpulan terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau policy, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar agar menjadi penentuan cara melakukan pemerintahan).⁸

Menurut Efriza partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta dalam proses pengolahan negara.⁹ Sementara itu pamungkas menjelaskan partai politik sebagai organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur dan kekuasaan yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam kontestasi pemilu.¹⁰

Partai politik dalam istilah sosiologi politik merupakan kumpulan dari sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan atau negara. Adapun dalam ilmu politik, istilah partai politik bisa disebut sebagai suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Secara umum, tujuan dibentuknya partai politik adalah memperoleh

⁷Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, h. 404.

⁸Wirjono Projodikro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: PT Eresco, 1981), h.

100.

⁹Efriza, *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 209.

¹⁰Ridho Al-Hamdi, *Op Cit*, h. 8.

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.¹¹

Recall adalah istilah pinjaman yang belum ada pandangannya di Indonesia. Pengertian recall di Indonesia berbeda dengan pengertian Recall di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat istilah recall, lengkapnya *recall election* digunakan untuk menyatakan hak rakyat pemilih (konstituen) untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya berakhir. Prosedurnya dimulai dari inisiatif rakyat pemilih yang mengajukan petisi kepada anggota badan perwakilan. Bila Badan Perwakilan Rakyat menyetujui petisi pemilih (konstituen) maka diadakan pemungutan suara yang akan menentukan apakah wakil rakyat terkait akan lengser atau tetap dijabatannya. Recall adalah hak konstituen, bukan hak dari wakil rakyat *representative*.¹²

Recall dipahami secara umum adalah penarikan kembali anggota DPR untuk diberhentikan dan karenanya digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR yang ditarik tersebut. Dalam kepustakaan definisi recall antara lain dikemukakan oleh sarjana Belanda, Tomassen yang menyatakan bahwa “*recall rech, het rechts van een politieke partij oom een via haar kandidaten lijst gekozen parlement lid terug te roepen*” (hak recall ialah hak suatu partai politik untuk menarik kembali anggota parlement yang terpilih melalui daftar calon yang diajukannya).¹³

¹¹A.A, Said Gatara, Moh. Dzukiah Said, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembagngan Kajian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 109.

¹²R.M Ananda B Kesuma, Tentang “Recall”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No.4 (Desember 2006), h. 156.

¹³M. Hadi Subhan, *Op.Cit*, 46.

Beberapa penulis atau pengamat telah memberikan berbagai pendapatnya mengenai hak recall. C.F. Strong mengemukakan bahwa recall memberikan hak kepada pemilih atau pemilik hak suara yang merasa tidak puas untuk mengajukan usulan, sebelum pemilu berikutnya dilaksanakan, agar salah seorang atau beberapa wakil yang mereka anggap tidak becus itu ditarik dan digantikan dengan wakil lain yang lebih sesuai dengan kemauan mereka melalui pemilihan sisipan. Recall terhadap wakil rakyat atau legislator merupakan perwujudan kekuasaan rakyat dibidang politik. Menurut C.F. Strong kelemahan recall ialah bahwa recall dapat menimbulkan suatu semangat pecut dan semangat budak. Jika recall diterapkan pada semua legislator maka ada kemungkinan lembaga perwakilan itu berubah fungsi menjadi “kumpulan delegasi belaka” yang rapuh terhadap serangan korup dari setiap kelompok klik aktif (yakni orang yang gemar berpolitik untuk kepentingannya sendiri). Pada akhirnya, hal ini justru akan mendorong orang-orang yang bersemangat publik untuk keluar dari kehidupan publik. Jika itu terjadi, yang rugi bukan hanya mereka, tapi juga masyarakat secara keseluruhan.¹⁴

Muhammad Hatta berpendapat bahwa hak racall itu hanya ada dalam sistem fasisme dan komunisme. Demokrasi tidak kenal akan hak itu. Dalam sistem demokrasi, siapa saja yang dipilih oleh rakyat menjadi anggota DPR, ia harus tetap menyandang kedudukannya sebagai anggota DPR sampai periode pemilihan umum berikutnya. Pimpinan partai memang berwenang sepenuhnya untuk menentukan siapa saja yang akan dicalonkan partainya untuk duduk dalam

¹⁴ Haris Munandar , *Pembangunan Politik Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 128.

parlemen. Tapi apabila seorang yang dicalonkan itu telah dipilih atau dipilih kembali oleh rakyat, maka pihak partai tidak berhak memberhentikannya, karena hal itu sama saja artinya dengan menggugurkan pilihan rakyat bila hak recall akan dibenarkan, maka prinsip utama demokrasi, yakni kekuasaan ditangan rakyat, telah dilanggar. Lebih baik pemilihan umum yang berkala itu dihilangkan saja, jika para wakil yang terpilih oleh rakyat sewaktu-waktu bisa di recall. Muhammad Hatta juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa meskipun hak recall itu inkonsisten dengan sistem pemilihan distrik, tetapi sesuai dengan sitem pemilihan proposional dimana rakyat memilih tanda gambar partai dan tidak orangnya secara langsung. Karena, pada kenyataannya disebelah tanda gambar itu tercantum daftar urutan kandidat-kandidat yang dicalonkan oleh tiap-tiap partai. Terpilihnya anggota-anggota yang didaftar itu ditentukan oleh jumlah perolehan suara menurut urutannya. Menurut Hatta, sistem distrik memang lebih baik karena lebih mendidik tanggung jawab para anggota DPR akan tetapi ini tidak ada sangkut pautnya dengan hak recall.¹⁵

Harun Al-Rasyid mengemukakan bahwa hak recall memang inkonsisten dengan sistem pemilihan proporsional, di mana rakyat memilih tanda gambar partai dan tidak orangnya secara langsung. Apalagi dengan tidak berlakunya asas domisili. Oleh karena itu, menurut Harun Al-Rasyid, jika kita tidak menghendaki adanya lembaga hak recall, maka dalam pemilihan umum yang akan datang hendaknya dipakai sistem pemilihan distrik. Tjipta Lesmana mangatakan bahwa adanya lembaga recalling inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa

¹⁵ *Ibid.* h. 129.

anggota dewan cenderung pasif dan mau amannya saja. Akibatnya mereka kurang mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan baik.¹⁶

B. Sejarah Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR

Pengaturan recall dalam sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami dinamika. Pada masa rezim Presiden Soekarno, recall terhadap anggota parlemen dimungkinkan dan bahkan pelaksanaannya otoriter pada saat itu. Karena penggunaan hak recall terlalu permisif pada waktu itu, tak kurang dari seorang Muhammad Hatta mengkritik keras adanya recall tersebut.¹⁷

Ketentuan dan praktek recall juga terus berlangsung pada rezim Presiden Soeharto dimasa Orde Baru. Pengaturan recall pada zaman orde baru secara tegas dikonstatir dalam pengaturan perundang-undangan pada waktu itu. Praktek recall zaman Orde Baru jarang terjadi. Hal itu karena situasi dan kondisi perpolitikan dalam praktek kenegaraan sangat homogen dibawah suatu kondisi sang presiden, yakni Soeharto. Recall pada saat itu digunakan sebagai senjata untuk membungkam politisi yang tidak mengikuti irama alunan dari sang komando.¹⁸

Praktek pemakaian hak recall pasca pemilu 1973 yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan sosial-politik terhadap para anggotanya yang didasarkan pada alasan bahwa sikap-sikap atau tindakannya di lembaga perwakilan tidak sejalan dengan kebijakan yang telah digariskan induk organisasinya.¹⁹

1. Fraksi PPP. Sebelum berfungsi menjadi PPP, PSII pernah merecall dua orang anggotanya di DPR karena kemelut penggantian

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ M. Hadi Subhan, *Loc. Cit.* 46

¹⁸ *Ibid.*, h. 47.

¹⁹ Haris Munandar, *Op. Cit.*, h.133.

pimpinan partai tersebut. Recall tersebut berhasil. Artinya, orang yang bersangkutan benar-benar kehilangan status dan keanggotaannya dari lembaga perwakilan, tanpa menimbulkan dampak yang berarti terhadap orsospol yang menerapkan hak recall tadi. Pada DPR periode 1982 -1987 PPP melaksanakan recaling terhadap 4 orang anggotanya tetapi mendapat reaksi dari masyarakat dan ketua MPR/DPR bahkan tidak meluluskan recaling tersebut, dan juga tidak bersedia menyampaikannya ke Presiden sehingga recaling itu praktis gagal.

2. Fraksi PDI. Fraksi ini yang paling banyak merecall anggotanya dan paling banyak pula mencatat keberhasilan recaling. Pada DPR periode 1977-1982 PDI telah merecall 6 orang anggotanya. Kemudian pada periode 1983-1988 PDI kembali merecall 11 anggota DPR dan 4 anggota MPR.

3. Fraksi Karya Pembangunan. Fraksi ini hanya melakukan sekali tindak recalling saja terhadap para anggotanya di DPR, yaitu pada DPR periode 1971-1977. Semua ada tiga orang, dua orang karena dianggap terlibat dalam Malari 1974, sedangkan yang seorang lagi karena tindak pidana korupsi.

Pada era Orde Baru kasus recall yang cukup dramatis adalah kasus recall Sri Bintang Pamungkas. Sri Bintang Pamungkas di-recall dari keanggotaannya sebagai wakil rakyat di DPR karena dianggap melawan pemerintah Orde Baru. Menurut pengakuan Sri Bintang Pamungkas yang menyampaikan kesaksiannya

dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada 17 juli 2006 bahwa “sebetulnya masalah recall sudah disampaikan dengan jelas, pada tahun 1990-1993, yaitu ketika Menteri Dalam Negeri Yogo S. Memet menyatakan bahwa Lembaga Perwakilan Rakyat, ini dalam Undang-Undang Susduk Tahun 1969, adalah wakil partai, bukan wakil rakyat dan semenjak itu terjadilah kegaduhan nasional, sehingga ketika saya diputuskan untuk di-recall maka munculah pemikiran-pemikiran reformasi. Dan didalam pemikiran reformasi itu termasuk saya adalah yang salah satu yang ikut berbicara mengenai konsep-konsep reformasi. Sebetulnya yang terjadi pada Orde Baru itu adalah kekuasaan Presiden yang absolut. Ini adalah maunya Presiden dan Presiden tidak mau diganggu gugat, tidak mau ada oposisi, bahkan dipelajaran P4 disebutkan di dalam demokrasi yang kita anut tidak boleh ada oposisi, tidak boleh ada perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat dianggap kontra terhadap pemerintah, kontra terhadap presiden dan dia harus dijatuhkan”²⁰

Sedemikian repressifnya pemerintahan pada zaman orde baru tersebut, sehingga pranata recall ini diidentikkan dengan pranata yang berfungsi menghabisi lawan-lawan politik pemerintahan. Pranata recall tidak memiliki dimensi positif apapun, pada saat itu, sehingga persepsi masyarakat terhadap pranata recall sedemikian negatifnya.²¹

Setelah rezim Soeharto tumbang pada 1998 maka kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia memasuki era yang baru. Era yang baru ini adalah buah dari gerakan reformasi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa

²⁰ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, h. 47

²¹ *Ibid.*

dan kaum intelektual saat itu. Pada era reformasi ini, tatanan perpolitikan juga berubah. Pranata recall saat itu dianggap sebagai alat untuk memberangus hak-hak politik dan hak berekspresi juga dilenyapkan dari peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang paket politik saat itu, yakni UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan UU. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, tidak mengenal sama sekali pranata recall tersebut.

Pada era awal reformasi tersebut, merupakan era di mana terjadi euforia dalam berdemokrasi sehingga sangat logis dan wajar pengaturan hak-hak politik dalam berdemokrasi sedemikian bebasnya termasuk kebebasan berekspresi bagi anggota parlemen dengan tidak mengenal adanya recall. Bahkan seorang anggota DPR dapat keluar dari keanggotaan suatu partai politik dengan tetap menjadi anggota DPR. Ini terjadi ketika seorang anggota DPR yang bernama H. Hartono Mardjono keluar dari keanggotaan partai politiknya akan tetapi ia tetap menjadi anggota DPR dan masuk sebagai anggota non fraksi.²²

Perubahan pengaturan recall terjadi ketika akan memasuki pemilihan umum di tahun 2004. Undang-undang paket politik 2003, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No.22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU No. 13 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Anggotaa DPR, DPD, dan DPRD mengatur pranata recall ini. Pranata recall dalam UU susduk dikenal dengan nama penggantian antarwaktu (PAW). Kendatipun makna recall tidak sama persis dengan makna penggantian

²² *Ibid.*, h. 48

antar waktu, akan tetapi di dalam penggantian antar waktu terdapat didalamnya recall tersebut.²³

Adapun latar belakang pranata recall ini dihidupkan kembali, menurut Nursyahbani Kantja Sungkana bahwa “pada saat pembahasan memang situasi batin anggota DPR diliputi oleh yang juga tentunya adalah pimpinan-pimpinan Parpol juga diliputi oleh kegelisahan, karena pada waktu itu ada kasus dimana seorang anggota Parpol diberhentikan, akan tetapi tidak bisa di recall waktu itu. Kalau tidak salah itu kasus Pak Marjono dari PBB, nah itu suasana batin yang meliputi pembahasan UU Parpol dan UU Susduk. Sementara itu tuntutan masyarakat untuk mempunyai anggota MPR, DPR, DPD dan juga DPRD yang akuntabel terhadap rakyat itu juga meningkat sekali dan oleh karena itu pembahasan juga dilingkupi oleh keinginan untuk memiliki para wakil yang accountable dan oleh karena itu dapat dinilai dari segala prilakunya, perilaku politiknya juga sejauh mana komitmen dan kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan bagaimana bertanggung jawab moral dan politisnya kepada pemilih khususnya di daerah pemilihannya dan tolak ukur tersebut tidak hanya menjadi komitmen moral, melainkan harus juga diwujudkan di dalam kenyataan.”²⁴

Namun demikian bagi mereka yang dianggap kurang berkomitmen atau melanggar konstitusi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari masing-masing anggota parpol itu harus juga melalui proses pemeriksaan dan verifikasi tentang adanya dugaan pelanggaran atau kewajiban yang dibebankan pada

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, h. 49

anggota partai tersebut oleh masing-masing partainya, dan tentunya secara umum masing-masing partai juga memiliki badan kehormatan. Ini juga menunjukkan bahwa penghentian sebagai anggota parpol yang menyebabkan recall sebagaimana diatur oleh undang-undang atau pergantian antarwaktu tidak bisa dilakukan sewenang-wenang dan tentunya harus melalui koridor undang-undang. Namun intinya adalah bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) untuk pertama kalinya parpol itu masuk didalam konstitusi. Hal ini memperlihatkan pentingnya fungsi parpol di dalam mengaktualisasikan kepentingan rakyat yang diwakilinya, karena memang fungsi parpol melakukan agregasi politik.²⁵

Fakta yang terjadi di Indonesia terdapat perbedaan pendapat terkait dengan hak recall partai politik terhadap anggota DPR, ada yang berpendapat bahwa recall bertujuan untuk penguatan partai politik, bahwa penguatan partai politik memang konsekuensi dari perkembangan demokrasi modern. Namun, pasca perubahan UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa anggota DPR adalah wakil partai politik dengan delegasi daulat partai politik. Karena itu, jika seorang anggota DPR akan diberhentikan, caranya harus melalui daulat rakyat konstitusional. Dari perdebatan tersebut menimbulkan kontroversi dalam pelaksanaan recall partai politik terhadap anggota DPR. Berikut praktek recall yang kontroversial yang pernah terjadi di Indonesia.²⁶

1. Aziddin direcall oleh Partai Demokrat lewat pemecatan Badan Kehormatan dikarenakan kasus catering haji.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ “Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Praktek Ketatanegaraan Di Indonesia” (Onl-line), tersedia di: <http://www.lutfichakim.com/2011/12/hak-recall-partai-politik-terhadap.html> (04 september 2000)

2. Marissa Haque direcall oleh partai PDIP dikarenakan maju sebagai calon wakil gubernur dalam pilkada propinsi Banten
3. Djoko Edhi Sutjipto Abdurrahman direcall oleh partai PAN karena ikut studi banding RUU Perjudian ke Mesir
4. Zaenal Ma'arif direcall oleh partai PBR terkait kasus Poligami.
5. Lily Wahid dan Effendi Choiri direcall oleh partai PKB karena membelot dari kebijakan partai, dalam keputusan terkait panitia khusus hak angket Bank Century, serta di usulan hak angket mafia pajak.

Ketika merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 tentang pengujian konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Permohonan pengujian dua undang-undang tersebut dilakukan oleh Djoko Edhi Sutjipto Abdurrahman, setelah ia di-recall oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dari jabatannya sebagai anggota DPR. Putusan Mahkamah Komstitusi tersebut menyatakan bahwa recall terhadap anggota DPR yang dilakukan partai politik pengusungnya tidak menyalahi konstitusi.²⁷

C. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Partai politik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya ditentukan oleh berbagai hal. Kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik bergantung pada

²⁷ *Ibid.*,

kelompok-kelompok yang terdapat di dalamnya dan tujuan-tujuan yang dikejar.²⁸

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terdapat dua macam tujuan partai politik yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:²⁹

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:³⁰

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan basis sosial dan tujuan partai politik dibagi menjadi empat tipe yaitu:³¹

- a. partai politik berdasarkan lapisan masyarakat yaitu bawah, menengah dan lapisan atas.
- b. Partai politik berdasarkan kepentingan tertentu yaitu petani, buruh dan pengusaha.
- c. Partai politik berdasarkan pemeluk agama tertentu.

²⁸ Haryanto, *Partai Politik "Suatu Tinjauan Umum"*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), h. 11.

²⁹ Partai politik, Op.Cit., pasal 10 ayat (1).

³⁰ Partai politik, Op.Cit., pasal 10 ayat (2) dan (3).

³¹ Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 144

d. Partai politik yang didasarkan pada kelompok budaya tertentu.

Guna mencapai tujuan-tujuannya, partai-partai politik perlu melakukan beberapa hal.

Pertama, partai-partai politik merekrut pengikut-pengikut mereka, mencari dana untuk mendukung pilihan-pilihan mereka untuk memegang jabatan publik. Tanpa partai-partai politik proses pemilihan pejabat-pejabat menjadi kacau karena ratusan orang bisa saja mencalonkan diri untuk setiap jabatan.

Kedua, partai-partai politik merumuskan dan mempromosikan kebijakan kebijakan yang merupakan cerminan opini publik. Dengan cara ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat yang mereka wakili dengan pemerintah.

Ketiga, partai-partai politik menolong mengorganisir institusi-institusi utama pemerintah. Posisi-posisi kepemimpinan dalam badan legislatif dan komisi-komisinya dibagi berdasarkan partai yang memiliki anggota paling besar di parlemen.³²

Suatu partai politik dibentuk dan didirikan adalah untuk menjalankan fungsi-fungsi politik, dan fungsi-fungsi politik itulah yang kemudian menjadi semacam *blue print* yang harus dijalankan oleh partai politik. Suatu partai politik adalah himpunan, organisasi, atau perkumpulan individu yang memiliki kesamaan visi-misi untuk membangun Negara-Bangsa melalui perjuangan struktural. Karena itu, partai politik berjuang untuk memperbaiki keadaan suatu bangsa

³² Rafael Raga Maran, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: RinekaCipta, 2007), h. 84-85.

menjadi bangsa yang beradab dan melayani masyarakat.³³ Setiap keberadaan lembaga politik, termasuk partai politik, tentunya memiliki fungsi-fungsi politik hanya saja, fungsi partai politik akan berbeda-beda satu sama lain, khususnya dalam hal pengejawantahannya, apabila dikaitkan dengan baragamnya sistem politik yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara.³⁴

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, partai politik berfungsi sebagai sarana:³⁵

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Penyerap penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menyalurkan kebijakan negara
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena memiliki fungsi yang strategis. Para ahli pun banyak yang merumuskan fungsi-fungsi dari partai politik. Fungsi utama partai politik adalah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya ialah melakukan kampanye, setelah

³³Fatahullah Jurdi, *Op.Cit.*, h. 146.

³⁴A.A. Said Gatara, *Op.Cit.* h. 227.

³⁵ Partai politik. *Op.Cit.*, pasal 11.

kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif ataupun eksekutif).³⁶

Kinerja setiap partai politik yang dinilai publik, terutama adalah pelaksanaa dan perwujudan semua fungsi partai politik dalam negara demokrasi. Partai politik sebagai salah satu unsur infrastruktur politik dalam sistem politik, memiliki fungsi sebagai sarana sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Sedang dalam aplikasi dan proses sosialisasi politik itu, terkait erat dengan komunikasi politik berperan dalam aktivitas partai politik yang pada umumnya berupa pemikiran politik, pembicaraan politik, dan tindakan politik.³⁷

Sebab itu, suatu partai memiliki akar sosial yaitu basis masyarakat yang harus diperjuangkan ditingkatkan struktural. Perjuangan itu adalah untuk meningkatkan kapasitas individu dan kehendak-kehendak komunitas masyarakat yang terabaikan dari pembangunan. Sehingga kerja partai politik adalah menyatukan gagasan-gagasan, lalu memformulasikan untuk kepentingan bersama. Sebab itu, suatu partai politik adalah merupakan “jalan”, atau “alat” untuk membina masyarakat agar terpenuhi hak-hak politik mereka sebagai warga negara. Juga sekaligus sebagai bentuk representasi dari negara demokrasi. Karena itu fungsi-fungsi partai politik adalah:³⁸

Sarana komunikasi politik, komunikasi politik sebagai salah satu fungsi *input* dalam sistem politik, pada hakekatnya, menggambarkan proses

³⁶ Muhadam Labolo. *Op.Cit.* h. 15.

³⁷ Anwar Arifin, *Politik Pencitraan Pencitraan Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 195.


³⁸ Fatahullah Jurdi, *Op.Cit.*, h. 146.

penyampaian informasi-informasi politik. Di mana melalui media komunikasi inilah kita dapat menyampaikan informasi-informasi politik. Adapun media komunikasi yang dapat kita kenal dalam terminologi sistem politik, adalah partai politik. Partai politik yang sebelumnya telah melakukan fungsi *agregasi* kepentingan (aspirasi, pendapat, tuntutan dan kepentingan) selanjutnya aspirasi atau kepentingan dan pendapat itu dirujuk kepada bagaimana masyarakat merumuskan dalam bentuk yang lebih teratur untuk diartikulasikan. Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan itu dimasukkan dalam program partai politik untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan sebagai kebijakan umum. Dengan demikian segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis, dapat diterjemahkan kedalam bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat. Sebaliknya segala aspirasi-aspirasi, keluhan-keluhan, protes dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak dirumuskan dalam bahasa teknis, dapat diterjemahkan oleh partai politik kedalam bahasa yang dapat dimengerti oleh pemerintah. Jadi dengan demikian, proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat kiranya berlangsung secara efektif dengan melalui partai politik.³⁹

Sarana sosialisasi politik, partai politik juga memainkan peran sebagai instrumen sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik dimaksud proses yang memungkinkan seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana dia berada.

³⁹ P. Antonius Sitepu, *Op.Cit*, h. 189.

Proses ini disebut juga pendidikan politik, yang berlangsung secara bertahap mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Melalui proses sosialisasi, norma-norma dan nilai-nilai dialihkan dari generasi tua kepada generasi muda. Melalui pendidikan politik yang berlangsung secara teratur dan sistematis, suatu partai politik dapat menanamkan sekaligus mengembangkan kesadaran politik pada diri para pendukung mereka. Dengan kesadaran politik dimaksud menumbuhkan kesadaran seorang akan hak-hak sekaligus tanggung jawabnya sebagai warga negara. Melalui pendidikan politik, seorang warga negara tahu bahwa kepentingan pribadi atau kelompok sendiri hendaknya ditempatkan di bawah kepentingan nasional.⁴⁰



Sarana rekrutmen politik, fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk menentukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi masa yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya. Kesempatan untuk

⁴⁰Rafael Regan Maran, *Op.Cit.* h. 89.

berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.⁴¹

Untuk mengelola konflik, di dalam sebuah negara yang demokrasi, munculnya konflik merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Hal ini disebabkan karena semakin majemuknya masyarakat dan meningkatnya daya krisis dari setiap individu untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Konflik yang berasal dari tuntutan masyarakat tersebut apabila tidak dikendalikan dan diakomodasi dengan benar maka akan menimbulkan *chaos* yang akan mengarah kepada aksi-aksi fisik antar individu atau kelompok. Pada sistem politik di negara yang demokratis, pengendali konflik tersebut merupakan fungsi dari partai politik. Konflik juga dianggap sebagai penghalang dalam mencapai suatu tujuan akan tetapi hendaknya konflik dipahami sebagai jalan untuk mencapai suatu kebaikan bersama. Kebaikan bersama akan tercapai apabila partai politik melalui media berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik. proses pendidikan politik dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan seminar keikutsertaan dalam forum pertemuan. Selain itu, pendidikan politik juga diperlukan untuk menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang sehat, bersaing secara sehat, dan mendidik masyarakat untuk mematuhi aturan.⁴²

Dari keempat fungsi partai politik diatas, fungsi rekrutmen dianggap memiliki hubungan dengan bagaimana partai politik menjaring seseorang atau sekelompok orang sebagai kader politik, juga berhubungan dengan bagaimana

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.* h. 408.

⁴² Muhadam Labolo, *Op.Cit.* h. 20.

seseorang, baik dari “*in group*” maupun dari “*out group*” menjadi pimpinan partai atau pimpinan nasional (presiden atau wakil peresiden).⁴³

Sementara David McKay, dalam kajiannya atas partai-partai politik di Amerika Serikat, ia pun berkesimpulan bahwa partai politik memiliki fungsi:

- A. Agregasi kepentingan, fungsi ini adalah posisi partai sebagai alat untuk mempromosikan serta mempertahankan kepentingan dari kelompok-kelompok sosial yang ada.
- B. Memperdamaikan kelompok dalam masyarakat, fungsi ini adalah posisi partai politik untuk membantu memperdamaikan aneka kepentingan yang saling bersaing dan berkonflik dari masyarakat, dengan menyediakan platform penyelesaian yang seragam dan disepakati bersama.
- C. Staffing government, fungsi ini adalah posisi partai politik untuk mengajukan orang-orang yang akan menjadi pejabat publik, baik baru maupun menggantikan yang lama.
- D. Mengkoordinasi lembaga-lembaga pemerintah, fungsi ini adalah posisi partai politik mengkoordinasi aneka lembaga pemerintah yang saling berbeda untuk tetap memperhatikan kepentingan politik publik.
- E. Mempromosikan stabilitas politik - fungsi ini adalah posisi partai politik untuk mempromosikan stabilitas politik, misalnya dengan

⁴³A.A. Said Gatara, *Op.Cit.* h. 228

mengelola isu-isu yang dibawa kelompok ekstrim nonpartai ke dalam parlemen untuk dicarikan titik temunya.⁴⁴

Sehubungan dengan fungsi yang dilaksanakan oleh partai politik, maka dapat dinyatakan bahwa suatu partai politik yang baik salah satu syaratnya adalah bahwa partai politik tersebut harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi yang melekat pada dirinya dengan baik pula.⁴⁵

Kedudukan politik yang diperoleh oleh anggota partai politik untuk melaksanakan program dan memengaruhi kebijakan publik, baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif adalah kekuasaan yang bersumber dari rakyat di negara demokrasi. Memang partai politik merupakan sarana bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya. Jika fungsi utama partai politik tersebut dijalankan dengan baik dan prima dengan sendirinya partai politik akan memperoleh citra yang bagus dari publik. Citra yang bagus akan berdampak positif terhadap pembentukan dan pembinaan opini publik, yang akan memiliki efek positif terhadap pemilih untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Sebaliknya jika partai politik tidak dapat melaksanakan fungsi utamanya dengan baik, dengan sendirinya partai politik itu akan memperoleh citra buruk di benak publik. Citra yang buruk itu niscaya akan membuat partai politik itu akan dijatuhi oleh rakyat dan sekaligus akan membuat partai politik itu, tidak akan memperoleh banyak suara yang diperlukan dalam memenangkan pemilihan umum.⁴⁶

⁴⁴Fatahullah Jurdi, *Op.Cit.* h. 147

⁴⁵Haryanto, *Op.Cit.*, h. 13.

⁴⁶Anwar Arifin, *Op.Cit.* h. 198.

D. Hak dan Tugas Partai Politik

Selain memiliki tujuan dan fungsi partai politik juga memiliki hak yang diatur dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang diatur dalam Pasal 12 tentang hak partai politik.

Partai politik berhak⁴⁷:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- h. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan .
- i. Mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- j. Membentuk dan mewakili organisasi sayap partai politik.
- k. Memperoleh bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

⁴⁷ Partai politik, *Op.Cit.*, pasal 12.

Dalam negara yang berpaham demokrasi, di mana masyarakatnya merupakan masyarakat yang heterogen, partai politik mempunyai beberapa tugas, diantaranya yaitu:

1. Tugas pokok partai politik yaitu untuk menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik mengatur kemauan yang berbeda-beda dari rakyat dalam masyarakat, di samping itu juga menyalurkan keinginan-keinginan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kesimpang siuran pendapat di dalam suatu masyarakat, karena pendapat serta keinginan tiap-tiap individu atau orang ataupun kelompok orang dalam masyarakat modern adalah sama sekali tidak berarti jika tidak diatur dan dirumuskan bersama-sama dengan pendapat serta keinginan orang lain yang sepaham dan sealaran.
2. Partai politik bertugas untuk menampung semua pendapat dan keinginan rakyat atau khalayak ramai kemudian langkah berikutnya ialah memilihnya dan merumuskannya serta menyerahkan kepada pemerintah untuk dapat dijadikan program politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.
3. Partai politik juga mempunyai tugas untuk menyebarkan gagasan-gagasan atau ide-ide yang tersimpul di dalam rencana kebijaksanaan pemerintah.
4. Partai politik mempunyai tugas mendidik para warga negara menjadi orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial.

5. Partai politik mempunyai tugas untuk menumbuhkan dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional.
6. Demikian juga partai politik mempunyai tugas untuk mencari dan mengajak mereka yang kelihatan dan dianggap berbakat dan mampu untuk ikut serta dan aktif dalam lapangan dan kegiatan politik dan mendidik mereka untuk menjadi kader pimpinan.
7. Tugas lain dari partai politik yaitu mengatur pertikaian. Partai politik membantu merumuskan konflik-konflik dan selanjutnya berusaha untuk mengatasi konflik-konflik tersebut serta mencari penyelesaiannya.⁴⁸

E. Hak Recall Partai Politik menurut Undang-Undang

Recall menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD merupakan pemberhentian antarwaktu yang diatur dalam pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

Anggota DPR berhenti antar waktu karena:⁴⁹

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Diberhentikan

Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun.
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan kode etik DPR.

⁴⁸ Soelistyati ismail gani, *Op.Cit.* h. 113-114.

⁴⁹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 239.

- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dan diacani dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menjadi anggota partai politik lain.

Hak pemberhentian antarwaktu yang dilakukan oleh partai politik terdapat dalam pasal 239 ayat (2) huruf d, g dan h Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berkaitan dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik.

- (1) Anggota partai politik diberhentikan keanggotannya dari partai politik apabila:⁵⁰
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis,
 - c. Menjadi anggota partai politik lain,
 - d. Melanggar AD dan ART.
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.
- (3) Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selain itu hak recall partai politik juga tercantum dalam pasal 12 huruf g, dan h Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik, partai politik berhak:⁵¹

⁵⁰ Partai Politik, *Op.Cit.*, pasal 16.

- g. Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelum partai politik merecall anggotanya perlu diketahui bahwa di dalam recall oleh partai politik terdapat ruang bagi anggota DPR dalam mencari keadilan atas penggunaan hak recall partai politik terhadapnya untuk diselesaikan, baik melalui upaya legitimasi maupun non legitimasi. Hal ini terdapat dalam pasal 32 dan 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik.

Pasal 32:⁵²

- (1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan yang dibentuk oleh partai politik.
- (3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33:⁵³

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan

⁵¹ *Ibid.*, pasal 12 huruf g dan h.

⁵² *Ibid.*, pasal 32.

⁵³ *Ibid.*, pasal 33.

perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Mekanisme pemberhentian anggota DPR oleh partai politik diatur dalam pasal 240 dan 241 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Pasal 240:⁵⁴

- (1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPR wajib menyampaikan usul pemberhentian anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR.

Pasal 241:⁵⁵

- (1) Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Partai politik menjadi sangat penting didalam mengontrol para anggotanya yang melakukan aktualisasi politik atau konstituennya. Terkait dengan itu, maka diperlukan sebuah kontrol dari partai politik agar para anggotanya betul-betul menjalankan konstitusionalnya sekaligus kepentingan partai politik sebagaimana yang ditetapkan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan tentu saja berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu terhadap ketentuan

⁵⁴ MPR, DPR, DPD dan DPRD, *Op.Cit.*, pasal 240.

⁵⁵ *Ibid.*, pasal 241

mengenai penggantian antarwaktu itu, tentu saja dalam risalah banyak sekali dibicarakan oleh hampir semua fraksi untuk tidak memunculkan sebuah dominasi partai politik yang berlebihan tanpa batas, dan oleh karena itu ada ketentuan-ketentuan didalam partainya tentu saja memungkinkan juga hak pembelaan diri bagi para aggotanya.⁵⁶



⁵⁶ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, h. 50.

BAB IV

ANALISIS

A. Hak Recall Partai Politik terhadap Anggota DPR

Recall dipahami secara umum adalah penarikan kembali anggota DPR untuk diberhentikan dan karenanya digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR yang ditarik tersebut. Sedangkan, partai politik merupakan perkumpulan sejumlah warga negara yang tergabung dalam suatu kesatuan dengan tujuan tertentu.

Hak recall partai politik merupakan sarana yang disediakan oleh undang-undang untuk mengganti antar waktu anggota partai politik yang duduk sebagai anggota parlemen. Hak recall partai politik menjadi perdebatan dikarenakan kedudukan seorang anggota DPR yang merupakan wakil rakyat bersamaan kedudukannya sebagai anggota partai politik. Yang menjadi masalah adalah dimana banyak yang berpendapat bahwa hak recall partai politik ini cenderung didasarkan atas pertimbangan politisi semata untuk menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang serta menyalahgunakan wewenang. Hal ini menyebabkan fungsi parlemen sebagai kontrol politik terhadap kekuasaan eksekutif menjadi sirna.

Hak recall partai politik diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d g dan h Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Selain itu hak recall partai politik juga diatur dalam Pasal 12 huruf g, dan h Undang-undang Nomor 2

Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik.

Hak recall tidak sepenuhnya merupakan kesewenangan politik semata dikarenakan apabila partai politik akan merecall anggotanya maka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana tertera dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik. Selain itu juga sebelum partai politik merecall anggotanya perlu diketahui bahwa di dalam recall oleh partai politik terdapat ruang bagi anggota DPR dalam mencari keadilan atas penggunaan hak recall partai politik terhadapnya untuk diselesaikan, baik melalui upaya legitimasi maupun non legitimasi. Hal ini terdapat dalam Pasal 32 dan 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik.

Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Perselisihan tersebut dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan yang dibentuk oleh partai politik lalu disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementrian. Penyelesaian perselisihan internal partai politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Apabila penyelesaian perselisihan internal tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat

diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Perkara diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Selain itu anggota DPR yang di berhentikan oleh partai politiknya dapat mengajukan keberatannya dalam pengadilan sebelum putusan, sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Dengan adanya pengaturan penyelesaian perselisihan partai politik dapat dipahami bahwa recall merupakan instrumen untuk mengontrol para anggota partai politik yang menduduki kursi DPR agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekaligus kepentingan partai politiknya dan tetap mengutamakan pada kepentingan masyarakat.

Jika partai politik tersebut berlaku sewenang-wenang dalam melakukan recalling anggota partainya itu merupakan resiko dari partai politik yang bersangkutan dan masyarakatlah yang berwenang untuk melakukan penilaian terhadap partai politik tersebut. Jika masyarakat menilai bahwa partai politik tersebut tidak sesuai dengan aspirasinya maka masyarakat akan mengenakan sanksi, yakni sanksi politik yang berupa tidak akan memilih lagi partai politik yang bersangkutan pada pemilu berikutnya. Sebaliknya, jika masyarakat menilai bahwa partai politik masih amanah dalam menyalurkan aspirasi rakyat, maka hal itu merupakan keuntungan politik dari partai politik yang bersangkutan.

B. Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik terhadap Anggota DPR

Islam dan politik memang merupakan dua hal yang berbeda, Islam merupakan sebuah agama dan keyakinan sedangkan politik merupakan hal yang berkaitan dengan kekuasaan dan pemerintahan. Akan tetapi pada kenyataannya Islam harus terlibat dalam aktifitas politik dalam memperjuangkan kekuasaan dan kewilayahan. Begitupun pada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad Saw yang dalam sejarahnya dalam peristiwa *bay'at al-'aqabah* yaitu perjanjian antara Nabi Muhammad dengan penduduk Yastrib merupakan bukti tahap awal adanya pelaksanaan politik. Lalu Nabi Muhammad juga membuat kebijakan yang diwujudkan dalam Piagam Madinah.

Islam memang tidak mengenal adanya partai politik dalam mengurus dan mengatur negara, yang ada adalah sistem musyawarah, penunjukan, dan bai'at terhadap seseorang dalam kasus pemilihan kepala negara. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan sejarah Islam pada masa pengangkatan khalifah Abu Bakar hampir mirip dengan sistem pemilihan pada masa sekarang yang menggunakan partai politik. Pada masa itu kaum Anshar dan kaum Muhajirin saling berdebat dalam menentukan Khalifah pemimpin pengganti Nabi dari masing-masing kelompok.

Selain dikaitkan dengan sejarah pengangkatan Abu Bakar partai politik juga dikaitkan pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang berperang dengan Muawiyah yang mengakibatkan munculnya aliran-aliran politik Islam seperti Sunni, Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Yang masing-masing aliran

memiliki konsep pemikiran politik yang berbeda-beda. Terbentuknya aliran politik ini dapat dikaitkan dengan adanya partai politik pada saat ini. Partai menurut Imam ar-Razi dalam Mafatih al-Ghaib adalah kumpulan orang yang satu tujuan, mereka bersama-sama bersatu dalam kewajiban untuk mewujudkan tujuannya.

DPR menurut pakar fiqh siyasah dikenal dengan istilah *Al-hall Wa Al-aqdi* yang berarti orang yang dapat memutuskan atau mengikat. Dengan kata lain *Al-hall Wa Al-aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. *Al-hall Wa Al-aqdi* (Ahlul Ikhtiyar) yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk diba'at (dinobatkan) oleh mereka.

Pemilihan *Al-hall Wa Al-'aqdi* melalui dua proses, yakni melalui proses pemilihan oleh *Al-hall Wa Al-'aqdi* dan melalui proses penyerahan mandat oleh pemimpin sebelumnya. Al-mawardi menyebut *Al-hall Wa Al-aqdi* (Ahlul Ikhtiyar) harus memenuhi tiga syarat. Pertama, keadilan yang memenuhi segala persyaratannya. Kedua, memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya. Ketiga, memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan ia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling tahu kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.

Dalam Al-Qur'an dan hadis tidak terdapat adanya pembentukan lembaga-lembaga negara serta pemerintahan. Pembentukan lembaga-lembaga serta pemerintahan disesuaikan dengan keadaan dan tempat. Hal ini dikarenakan

pembentukan lembaga merupakan persoalan ijtihad bukan yang berasal dari nash, berarti umat Islam diberikan kesempatan untuk menciptakan kelembagaan yang diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Islam memang tidak terdapat pengaturan mengenai pemberhentian lembaga perwakilan atau *Al-hall Wa Al-aqdi*. Akan tetapi, hal ini dapat menggunakan metode ijtihad *al-maslahah al-mursalah* yang digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat. Penggunaan *al-maslahah al-mursalah* ini harus bersifat umum, bukan bersifat khusus. Artinya, lebih banyak memaslahatkan masyarakat secara keseluruhan daripada sekelompok orang atau seseorang tertentu. Para ulama mensyaratkan penggunaan *al-maslahah al-mursalah* diantaranya Muhammad Abu Zahrah, Abd al-Wahab al-Khalaf, serta Hanafi. Jika persyaratan yang dikemukakan oleh para ulama tersebut digabungkan maka persyaratan *al-maslahah al-mursalah* meliputi:

- a. Keharusan menetapkan kemaslahatan yang sesuai dengan syariah Islam.
- b. Keharusan menetapkan kemaslahatan yang didasarkan pada penelitian yang mendalam sehingga tidak meragukan bahwa ia benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan, dan menghindarkan kemadaran.
- c. Keharusan menetapkan kemaslahatan yang dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar, bukan sebagian kecil masyarakat.
- d. Keharusan menetapkan kemaslahatan yang memberikan kemudahan bukan mendatangkan kesulitan, dalam arti dapat dilaksanakan.

Dalam menetapkan kemaslahatan dalam Islam mewajibkan penguasa untuk selalu bermusyawarah dengan rakyat dan para pengikutnya. Karena dalam Islam sangat menekankan agar jiwa permusyawaratan merupakan jiwa yang dominan dalam kehidupan politik dalam masyarakat. Praktek permusyawaratan merupakan gaya hidup Nabi Muhammad Saw sendiri dalam menjalankan pemerintahannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan yang sudah dibahas dalam bab dua dan tiga penulis menyimpulkan bahwasannya:

1. Hak recall yang dilakukan partai politik kepada anggota DPR bukan merupakan kesewenang-wenangan melainkan merupakan bentuk pengawasan partai politik kepada anggotanya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan rakyat. Karena partai politik merupakan sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila partai politik melakukan kesewenang-wenangan pada anggotanya maka ia akan mendapatkan sanksi dari masyarakat dengan tidak memilih lagi partai politik yang bersangkutan pada pemilihan berikutnya.
2. Dalam fiqh siyasah tidak terdapat pengaturan mengenai hak recall partai politik terhadap anggota DPR atau *Al-hall wa Al-aqdi*. Akan tetapi pemberhentian partai politik terhadap anggota DPR dalam fiqh siyasah dapat dikaitkan dengan metode ijtihad *al-maslahah al-mursalah* yang digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-

persoalan yang tidak diatur oleh syariat atau kemaslahatan yang tidak diisyaratkan oleh Allah dalam bentuk hukum dan ia ditopang dengan dalil yang mendukung atau membatalkannya. Islam pada awalnya tidak mengenal adanya partai politik, yang dapat dicari adalah benih partai politik pada masa awal Islam seperti peristiwa *Tsaqifah Bani Saidah* serta peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Dalam hal memilih seorang pemimpin Islam tidak menggunakan sistem partai politik melainkan melalui sistem musyawarah, penunjukan, dan bai'at terhadap seseorang dalam kasus pemilihan kepala negara. Sistem musyawarah dilakukan oleh *Al-hall wa Al-aqdi* yang merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat (warga negara). Pembentukan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan tidak terdapat ketentuannya secara tegas dalam syariat Islam. Pembentukan lembaga-lembaga didasarkan pada tuntutan keadaan dan tempat.

B. Saran

1. Pembahasan mengenai partai politik terutama hubungannya dengan lembaga eksekutif, legislatif serta yudikatif masih relatif sedikit, maka kedepannya saya berharap teman-teman mahasiswa agar dapat memilih bagian-bagian seperti ini.
2. Kajian mengenai hak recall partai politik terhadap anggota DPR diwarnai banyak pro dan kontra. Didalam Islam juga tidak terdapat adanya sistem politik melainkan melalui sistem musyawarah yang

dilakukan oleh *Al-hall* wa *Al-aqdi*. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa seharusnya lebih mendalami bagaimana sistem politik pada masa lampau sebagai acuan kita pada saat ini.



DAFAR PUSTAKA

- A.A, Said Gatara, Moh. Dzukiah Said. *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembagngan Kajian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Abd al-wahab Al-Khalaf. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Mesir: Ad-Dar al-Kuwaitiyah, 1388H/ 1968M.
- Abdul Hayyie al-Kattani, Komaludin Nurdin. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Ahmad Sukarja, Syarief Ibnu Mular. *Tiga Kategori Hukum (Syari’at, Fikih Dan Konun)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali abd ar-Riziq. *al-Islam wa Ushul al-Hukm Bahs fi al-alagah wa al-Hukumah fi al-Islam*. Mesir: Sahimah Mishriyyah, 1334H/ 1925M.
- Amirudin, Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pusaka, 2006.
- Anwar Arifin. *Politik Pencitraan Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ayi Sofyan. *Etika politik islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah , Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Dhiauddin Rais. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insan, 2001.
- Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Fatahullah Jurdi. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

- Faturrahman A. Hamid. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Hamzah, 2009.
- Farchan Bulkin. *Analisa Kekuasaan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3S Indonesia, 1995.
- Haris Munandar. *Pembangunan Politik Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Haryanto. *Partai Politik "Suatu Tinjauan Umum"*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Hertanto. *Teori Teori Politik dan Pemiiran Politik di Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2006.
- Jubair situmorang. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: pustaka Setia, 2012.
- Kaelan, MS. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Mardalis. *Metode Penelitian Satu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Miftah toha. *Birokrasi Politik dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Miriam Budiarjo. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Puaka Utama, 2014.
- Muhadam Labolo, Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, teori, konsep, dan isu strategis*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Farabi, 1377H/1958M.
- Muhammad A.S. Hikam. *Islam Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga, 2000.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*. Jakarta: Prena Media, 2016.

Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group

Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara, Ajaran sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990

Musdah Mulia. *Negara Islam Pemikiran politik Husein Haikal*. Jakarta: Paramadina, 2000.

Nasiwa *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

P. Antonius Sitepu. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Peter Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer*. Jakarta: Modern English Press, 1999.

R. Erman Muchdin. *Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Yudistira, 1986.

Rafael Raga Maran. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: RinekaCipta, 2007.

Ramoung Samudin. *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Politik*. Jakarta: Gozan Press, 2013.

Ridho Al-hamdi. *Partai Politik Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Ridwan HR. *Fiqh Politik, gagasan, harapan dan kenyataan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Suyuthi J Pulungan. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

Soelistyati Ismail Gani. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Wirjono Projodikro. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Poltik*. Bandung: PT Eresco, 1981.

Yusran Asmuni. *Ilmu Tauhid*. Jakarta: Grafindo Persada. 1993.

Yuszil Ihzal Mahendra. *Moderenisme Dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Hasanudin Yusuf, *Partai Politik Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 1. Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2014.

Jimly Asshidiqie. *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Desember, 2006.

M. Hadi Subhan. *Recall: Antara hak Partai Politik dan hak Berpolitik Anggota Parpol*, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Desember, 2006.

R.M Ananda B Kesuma, *Tentang "Recall"*, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4. . Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Desember, 2006.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Praktek Ketatanegaraan Di Indonesia (Onl-line), tersedia di:

<http://www.lutfichakim.com/2011/12/hak-recall-partai-politik-terhadap.html>
(04 september 2000)

Format Partai Politik Dalam Sejarah Politik Islam (On-line), tersedia di:

<http://febi.walisongo.ac.id/category/kolom/kolom-dekan.htm> (9 maret 2015).

Partai Politik Islam (On-Line), tersedia di: <http://www.bimbingan.org/peranan-parpol-islam.com> (10 febuari 2014)

